



Kebijakan Pendataan PAUD dan Dikmas Tahun 2018

Oleh:

Harris Iskandar

Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas

Disampaikan pada Workshop Pengelola Dapodik PAUD dan Dikmas Tahun 2018

Makassar, 3 Juli 2018





Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah

Pemerintah

Penerbitan Juknis; NSPK
Penguatan Mutu
Akreditasi
Pembinaan dan Pengawasan



Pemerintah Daerah

- Pendataan dan Rekrutmen
- Penyiapan Anggaran, PTK dan Sarpras
- Koordinasi dan Pembinaan Pembelajaran
- Evaluasi

Pasal 26, Undang-Undang No.20/2013

Satuan

Lembaga PAUD, PKBM, Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, SKB, dan Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Rumah Pintar, Sekolah Rumah)

Program

Keaksaraan, Kesetaraan (paket A, B, C), PAUD, Kursus Keterampilan, Pendidikan Kewanitaan, Gender, Pendidikan Kepemudaan, dan pendidikan lainnya (pendidikan keluarga).



Grand Design Pengembangan Satuan Pendidikan Non-Formal

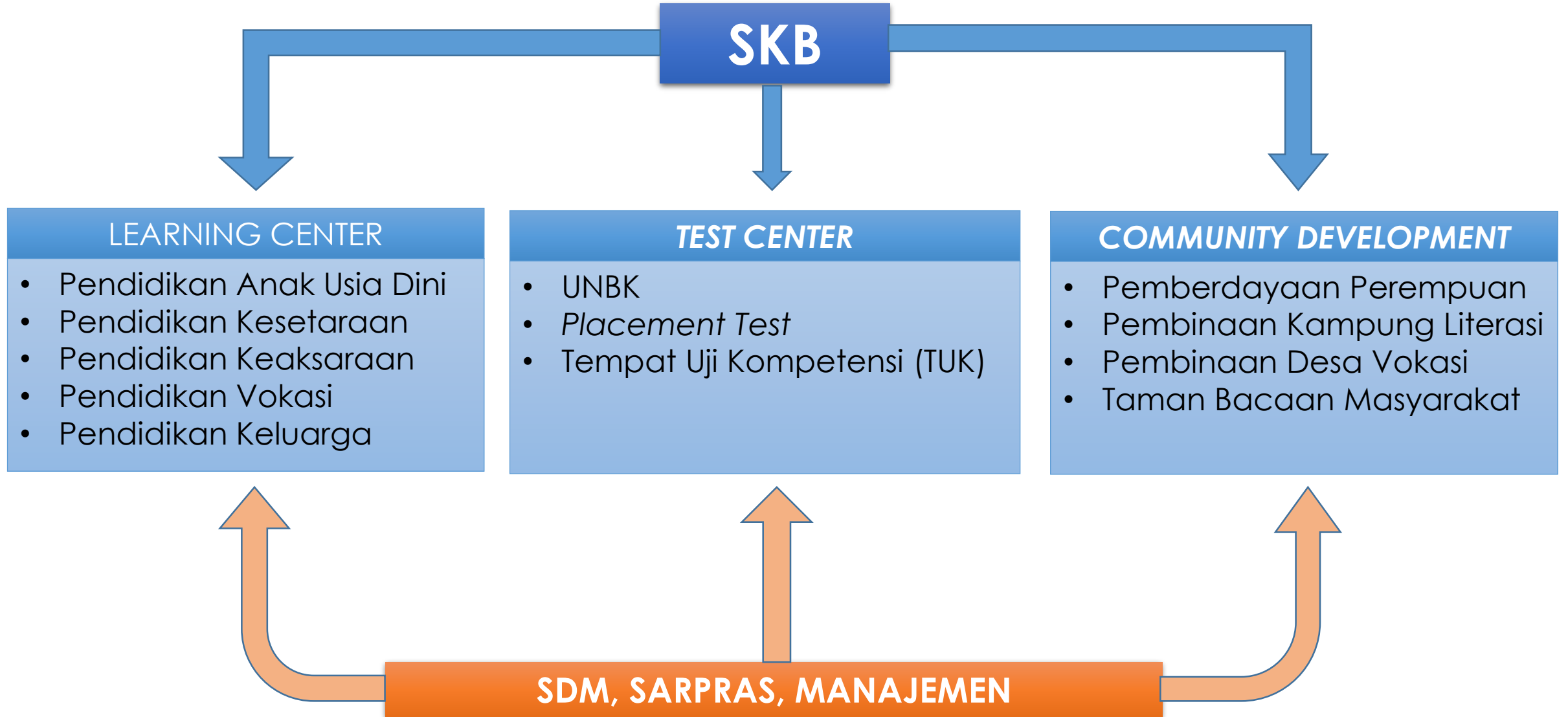


Peran Pendidikan Nonformal

1 Mengejar

2 Melengkapi/Mengiringi

3 Mendahului





Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pasal 5 (3):

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. **pendidikan anak usia dini;**
- b. pendidikan dasar; dan
- c. **pendidikan kesetaraan.**

Pasal 4 (2):

Materi muatan SPM mencakup:

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
- c. penerima Pelayanan Dasar.



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018



PAUD

Usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini

**Pendidikan
Kesetaraan**

Usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan



Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 & 2019

DAK NONFISIK



NO	PROGRAM	2018		USULAN 2019	
		SASARAN	ANGGARAN	SASARAN	ANGGARAN
1	BOP PAUD	6.184.762	4.070.194.800	8.000.000	5.200.000.000
2	BOP KESETARAAN			925.000	1.546.225.000
JUMLAH			4.070.194.800	8.925.000	6.746.225.000

DAK FISIK



NO	PROGRAM	2018		USULAN 2019	
		SASARAN	ANGGARAN	SASARAN	ANGGARAN
1	DAK FISIK SKB	195	152.734.000	323	644.167.423
2	DAK FISIK PAUD			1.482	464;647.144
JUMLAH			152.734.000	1.805	1.108.814.567



Kebijakan Pendataan



TARGET 2018



Semua SKB menjadi Satuan Pendidikan atau disiapkan

Semua peserta didik kesetaraan dan PAUD terdaftar di Dapodik dan memiliki NISN; Ujian Kesetaraan hanya untuk peserta didik yang memiliki NISN



Semua Satuan Pendidikan Nonformal Wajib Memiliki NPSN

Target Satuan Pendidikan Nonformal yang Memenuhi SNP dan Terakreditasi minimal 30.000 lembaga.



Jumlah SKB sebagai SPNF



372 SKB telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF

Terakreditasi	Belum Akreditasi
24 Lembaga (7%)	348 Lembaga (93%)



DATA DI LINGKUNGAN DITJEN PAUD DAN DIKMAS

JUN
2018



Lembaga
Ber-NPSN



231.516

Naik 2.593 dari Semester Lalu

Peserta
Didik



14.735.659

Naik 98.710 dari Semester Lalu

Pendidik
PAUD & Dikmas



537.706

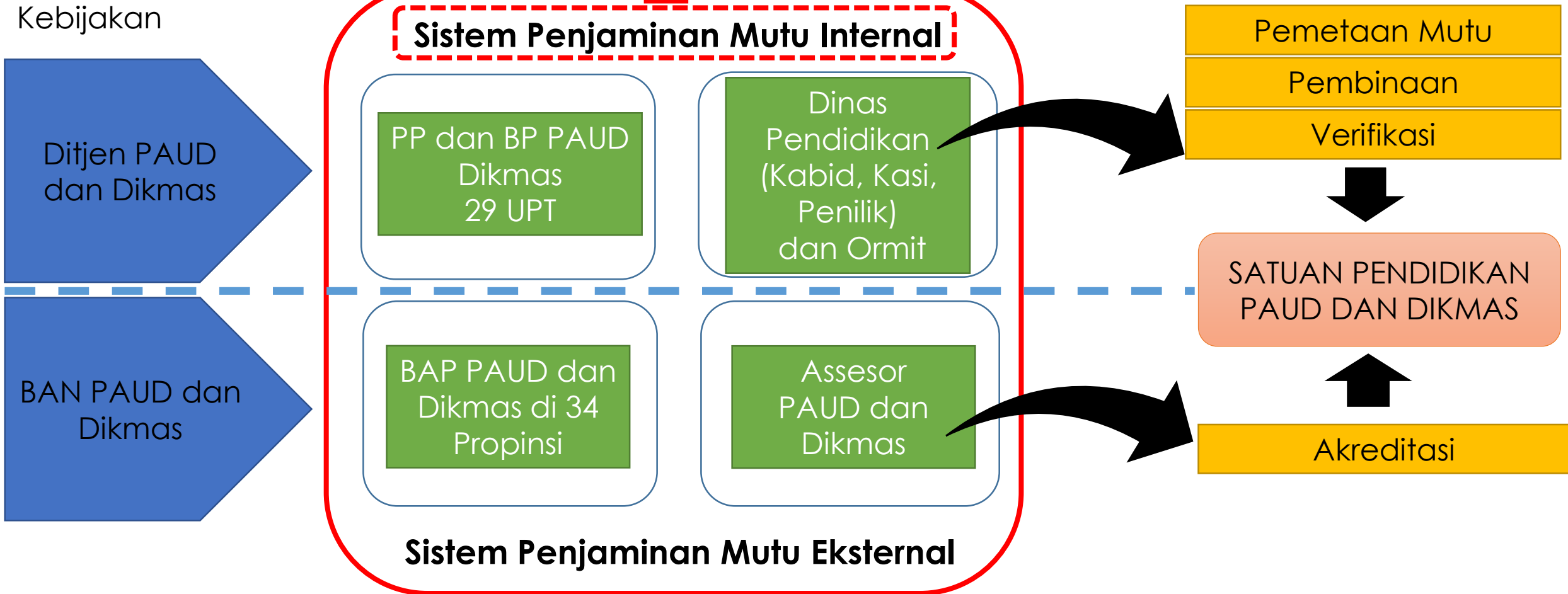
Turun 9.642 dari Semester Lalu

513.070 PAUD

3.937 LKP

20.699 PKBM & SKB

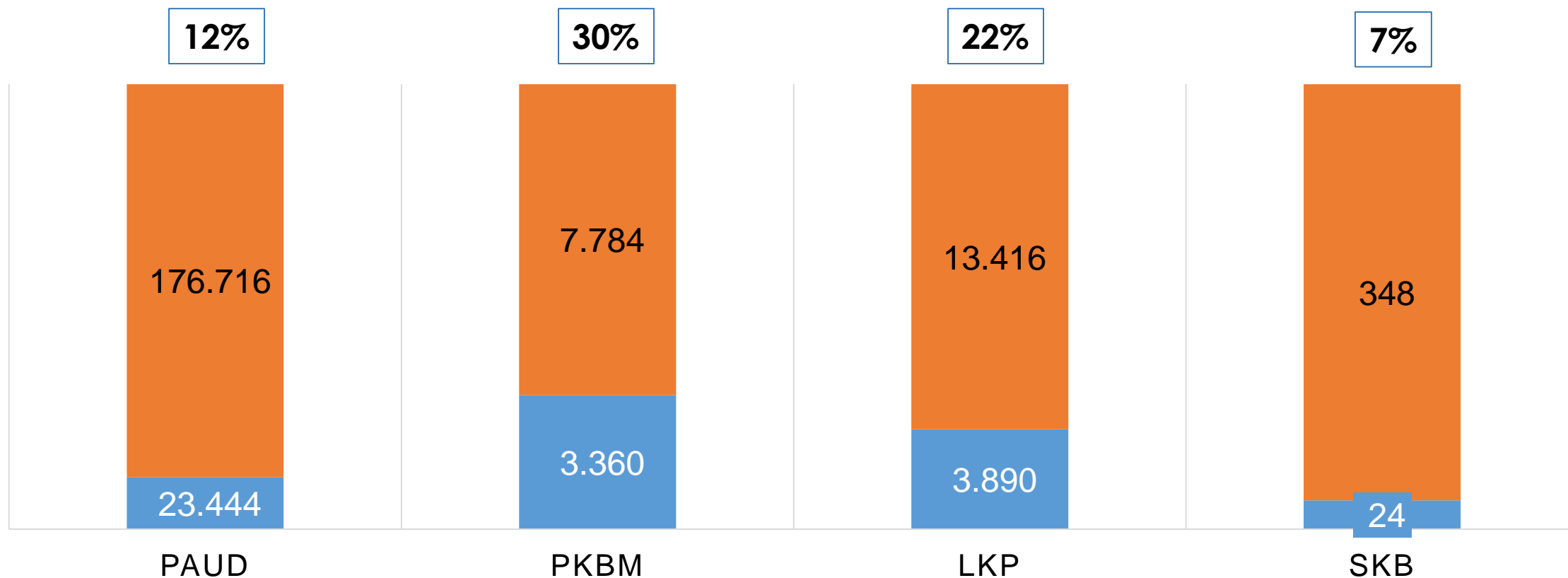
EDS – Evaluasi Diri Satuan --> Seluruh penerima bantuan wajib mengisi





AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN DIKMAS

JAN
2018



Sat. Pendidikan Belum Terakreditasi

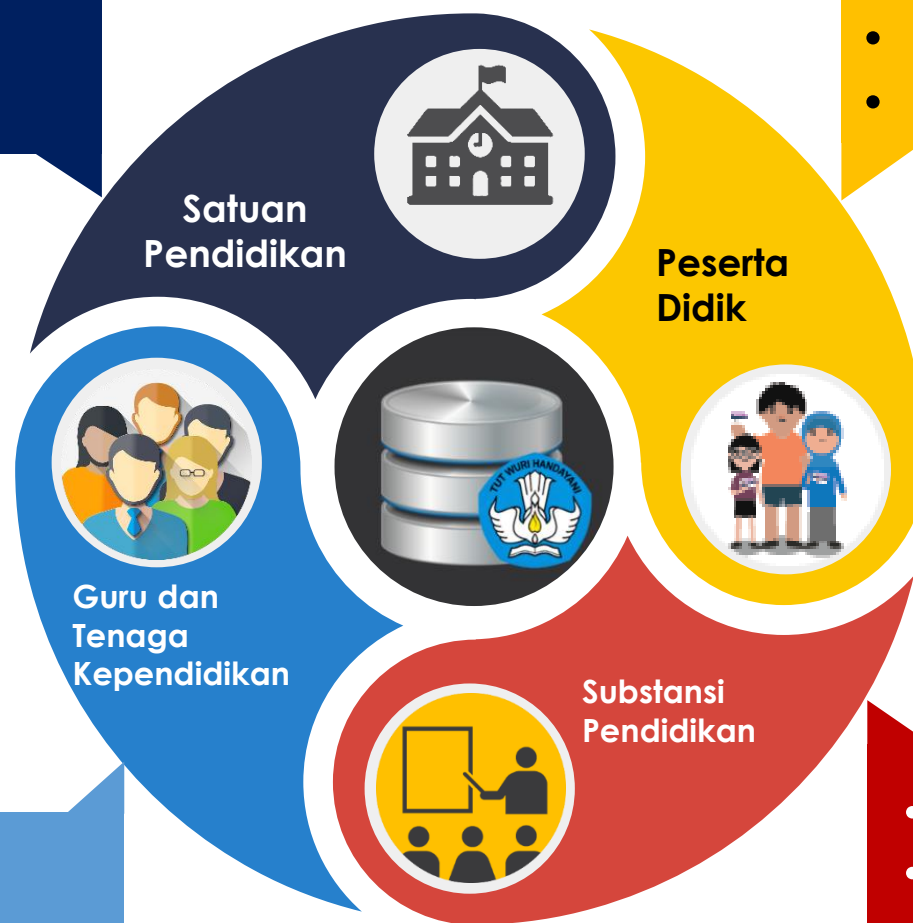
Jumlah Sat. Pendidikan Terakreditasi

Persentase Sat. Pendidikan Terakreditasi



- DAK Fisik SKB
- DAK Fisik PAUD

- Program Indonesia Pintar
- DAK BOP PAUD
- Ujian Nasional Kesetaraan



- Tunjangan Profesi Guru TK
- Insentif Guru Non-PNS
- Perencanaan Kebutuhan

- Akreditasi Satuan Pendidikan
- Pengembangan dan Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan



KELENGKAPAN PENGISIAN DAPODIK PAUD & DIKMAS

JUN
2018

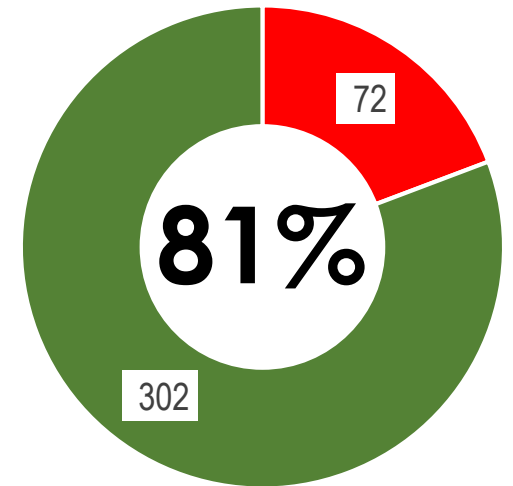
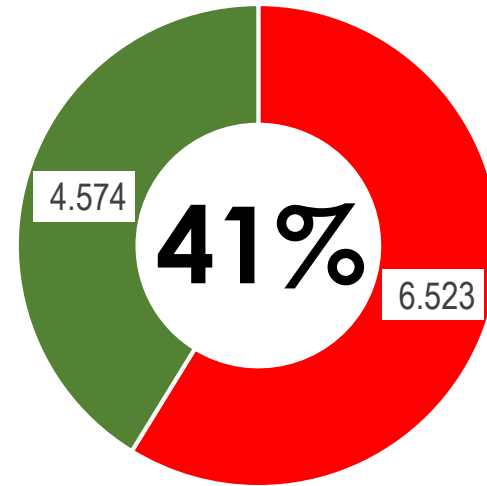
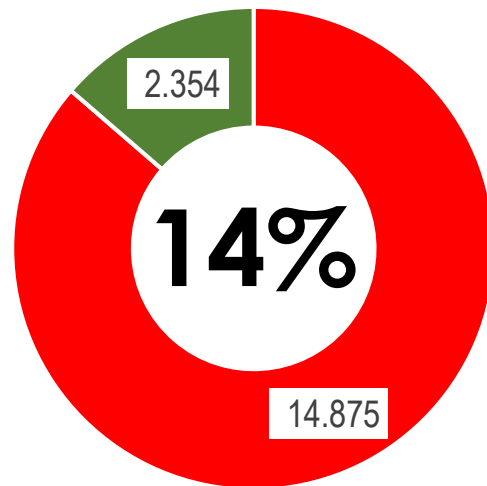
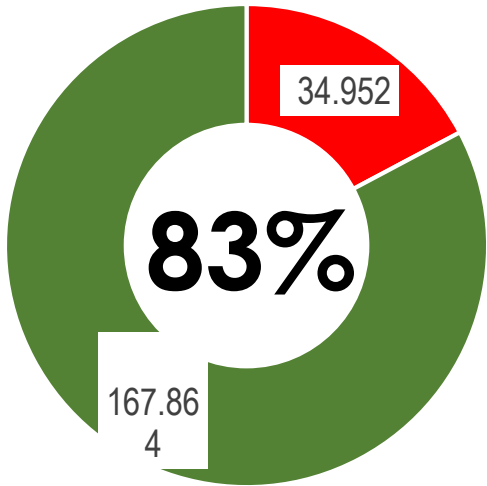


PAUD

LKP

PKBM

SKB



■ Belum Mengisi
■ Sudah Mengisi Dapodik

■ Belum Mengisi
■ Sudah Mengisi Dapodik

■ Belum Mengisi
■ Sudah Mengisi Dapodik

■ Belum Mengisi
■ Sudah Mengisi Dapodik



Provinsi dan Kab/Kota Terbaik

Berdasarkan Persentase Pengisian Dapodik

Provinsi

1. Prov. Jawa Tengah
2. Prov. Kepulauan Bangka Belitung
3. Prov. D.I. Yogyakarta
4. Prov. Jawa Timur
5. Prov. Kalimantan Selatan
6. Prov. Jawa Barat
7. Prov. Sumatera Selatan
8. Prov. Sumatera Barat
9. Prov. Aceh
10. Prov. Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota

1. Kab. Pangandaran
2. Kab. Gorontalo Utara
3. Kab. Tanah Laut
4. Kab. Kebumen
5. Kab. Hulu Sungai Utara
6. Kab. Bondowoso
7. Kota Tegal
8. Kota Probolinggo
9. Kota Cirebon
10. Kab. Rembang



Harapan

- Setiap Satuan PNF menyelenggarakan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi unggul daerah.
- SKB berkembang menjadi rujukan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- *Update* pendataan dilaksanakan secara regular dan *zero mistakes*.



Terima Kasih